

DAFTAR PUSTAKA

- Arman, Zuhdi, and Lenny Husna. "Penerapan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dari Perdagangan Valuta Asing Secara Online Yang Menggunakan Broker Luar Negeri." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15, no. 2 (2020): 277–89. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i2.2553>.
- Aruan, Albert Richi, and Noor Rahardjo. "Kedudukan Negara Atas Utang Pajak Pt. Artika Optima Inti Dalam Kasus Kepailitan Tesis," 2010.
- Ekoliawati Sinaga, Katarina, Ichsan Thoha, and Eliza Eliza. "Analisis Atas Pelaksanaan Pengenaan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Pt. Smart." *Journal of Tax and Business* 2, no. 2 (2021): 62–74. <https://doi.org/10.55336/jpb.v2i2.35>.
- Resmi, Siti. *perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat, Jakarta, 2019.
- Retno Wulandari, "Analisis Atas Pengenaan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dilaksanakan Oleh PT. XYZ." *Journal of Tax and Business* 1, no. 1 (2020): 10–19. <https://doi.org/10.55336/jpb.v1i1.4>.
- Gultom, Yulifar Amin, Risqi Nurika Fatha Hidayati, Kristian Abillio Pratama, and Suparna Wijaya. "Alternatif Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Beras." *Jurnalku* 2, no. 4 (2022): 552–62. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v2i4.336>.
- Ida, Ayu Ivon, and I Ketut Jati. "Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 13, no. 1 (2015): 292–310. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/13012>.
- Kumala, Ratih, Dedy Suryadi, Raden Wulan Saparinda, Gede Ngurah Indra Arya Aditya, Nur Arif Nugraha, Abdurohim, Irmawati, et al. *Bunga Rampai Kebijakan Perpajakan Di Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19, 2022*. <https://repository.penerbiteureka.com/publications/408620/>.
- Meliala, Tulis S., and Francisca Widiyanti Oetomo. *Perpajakan Dan Akuntansi Pajak*. 2008.
- Pandelaki, Rendy Daryl. "Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Maber Teknindo." *Jurnal EMBA* 1, no. 3 (2013): 160–70.
- Sahara, Khasanah, and Dwi Ratna Utari. "Pengaruh Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22 Dan Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Guna Menentukan Pajak Terutang." *Jca (Jurnal Cendekia Akuntansi)* 2, no. 1 (2021): 36. <https://doi.org/10.32503/akuntansi.v2i1.2016>.

Sinaga, Niru Anita. “Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia.” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 7, no. 1 (2014): 142–57. <https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.128>.

Sombo, Agustina Mardiana, “Analisis Atas Pelaksanaan Pengenaan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dilakukan Oleh PT. Sinar Sakti Metalindo.” Jurnal Ekonomi Utama 1, no. 1 (2022): 14–23. <https://doi.org/10.55903/astina.v1i1.4>.

Sukardji, Untung *Pokok-Pokok PPN*, Edisi Revisi, Jakarta, 2015, hal. 270

Wulandari Puspitasari. “Analisis Pengenaan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Oleh PT. SFP.” Jurnal Pajak Dan Bisnis (Journal of Tax and Business) 3, no. 2 (2022): 97–106. <https://jurnal.stpi-pajak.ac.id/index.php/JPB/article/view/53>.

Sugiyono, *metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2008, Hal 335.

Undang-Undang dan Peraturan Terkait

Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang – Undang No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang – Undang No 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

....., Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan adalah Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

....., Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

....., Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.

....., Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.03/2015 tentang Dasar Pengenaan Pajak.

....., Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/2010

Tentang Tata Cara Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak
Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Pabean

....., Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013
tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur
Pajak.

....., Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta
Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan
Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

....., Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2022
tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu

....., Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2017
tentang Pembayaran Pajak Secara Elektronik

....., Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak,
Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

....., Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022
tentang Faktur Pajak sebagaimana telah diubah dengan PER-11/PJ/2022

....., Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-29/PJ/2015
tentang Bentuk, isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai

....., Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 10/PJ/2010 tentang
Dokumen Tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PER-33/PJ/2014

....., Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2021
tentang Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur
Pajak

....., Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
488/KMK.010/2021 tentang Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi
Administratif berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga